

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan yang disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak internal dan eksternal yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari suatu kesatuan usaha yang merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi manajemen kepada pihak-pihak yang membutuhkan. (Yadiati, 2010:51). Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2009:2). Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban dari manajemen atas sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya (IAI 2002:4)

Kualitas pada suatu laporan keuangan dinilai dari kelengkapan, transparansi dan ketepatan waktu pelaporan. Dalam penyajiannya, laporan keuangan harus memiliki 4 (empat) komponen utama yang menjadi nilai dari kualitas laporan tersebut diantaranya, laporan keuangan harus relevan, laporan keuangan dapat dipahami, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan (Pramaharjan dan Cahyonowati, 2015). Informasi pada laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan tersebut memiliki nilai umpan balik, nilai prediksi dan ketepatan waktu saat pelaporan (Suparsada dan Putri, 2017). Oleh sebab itu, perusahaan

dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu agar para pengguna dari laporan keuangan dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Keuangan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik pasal 7 ayat (1) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2017 mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan yang disajikan secara tepat waktu dapat dijadikan pertimbangan bagi pengguna khususnya investor dalam menginvestasikan aset mereka pada perusahaan terkait. Informasi pada laporan keuangan hasil audit tersebut diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya investor dalam mengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kesempatan dalam mempengaruhi keputusan (Kuslihianiati, 2016).

Sebelum dipublikasikan, laporan keuangan harus terlebih dahulu melewati proses pemeriksaan oleh auditor atau yang lebih dikenal dengan *Auditing*. Menurut Arens dkk., (2003:15) *Auditing* adalah evaluasi atau pengumpulan bukti atas untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Audit atas laporan keuangan secara umum bertujuan menyatakan pendapat mengenai

kewajaran asersi-aseri yang ada dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Kartika, 2011).

Audit atas laporan keuangan dilakukan untuk menentukan kesesuaian laporan keuangan dengan kriteria yang telah disyaratkan. Perusahaan go publik yang telah terdaftar di bursa Efek Indonesia (BEI) diwajibkan untuk melaporkan hasil dari laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang telah diaudit secara tepat waktu (Suparsada dan Putri, 2017). Keterlambatan waktu pelaporan keuangan audit dapat berdampak pada ketepatan waktu penerbitan dari informasi akuntansi milik perusahaan dimana hal tersebut erat kaitannya dengan reaksi pasar atas informasi yang diterbitkan (Parwati dan Suhardjo, 2009). *Audit Report Lag* (ARL) merupakan rentang waktu penyelesaian laporan keuangan dihitung dari lamanya waktu pelaporan keuangan audit dilihat dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diterbitkannya laporan auditor independen dengan kata lain *audit report lag* adalah keterlambatan waktu penyelesaia laporan keuangan (Dwiarta, 2018). Keterlambatan pada pelaporan keuangan audit akan mempengaruhi *audit report lag* yang lebih panjang sehingga akan berdampak pada keterlambatan penerbitan laporan keuenhan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan OJK atas pemberian sanksi keterlambatan pelaporan keuangan nyatanya tidak membuat perusahaan lebih disiplin dalam melaporkan laporan keuangan yang tepat waktu. Dari tahun-tahun

sebelumnya masih ada perusahaan publik yang terlambat melaporkan laporan keuangan. Dikutip dari Harian Neraca Ekonomi, dalam siaran persnya di Jakarta pada Kamis (9/4), Bursa Efek Indonesia melaporkan 52 emiten yang masih belum melaporkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per Desember 2014 (Neraca, 2015). Pada 30 Juni 2016 dikutip dari CNN Indonesia, BEI mengganjar denda dan menghentikan sementara (suspensi) perdagangan saham 18 perusahaan tercatat karena belum menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit per 31 Desember 2015 (CNN Indonesia, 2016). Sedangkan di tahun selanjutnya BEI memberikan pernyataan suspensi pada 17 perusahaan publik yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2016 (Bursa Efek Indonesia, 2017). Kasus diatas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Persentase perusahaan publik tersuspensi tahun 2014-2016

No	Laporan keuangan yang berakhir tahun	Jumlah	Persentase %	
1.	2014	52	65,4%	
2.	2015	18		5,5 %
3.	2016	17		

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2018) yang diolah peneliti, 2018

Dari hasil perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan sangat signifikan dapat dilihat dari selisih perusahaan antara tahun 2014-

2015 dan tahun 2015-2016, dimana dari 18 perusahaan yang terlambat di tahun 2015 hanya 1 (satu) perusahaan yang berhasil lolos dari pernyataan suspensi akibat terlambat melaporkan laporan keuangan tahun 2016. Hal tersebut yang memotivasi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa saja faktor yang membuat penyajian dalam laporan keuangan terlambat. Laporan keuangan yang mengalami keterlambatan dapat menjadi suatu sinyal bagi para pengguna khususnya investor mengenai bagaimana kondisi perusahaan saat itu.

Keinginan menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu sering dihadapkan dan mengalami berbagai kendala, diantaranya yaitu sistem pengendalian dan tata kelola perusahaan yang kurang maksimal. Tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian yang bertujuan melindungi hak-hak pemegang saham dan pihak yang berkepentingan didalamnya (Swami dan Latrini, 2013). Praktik *good corporate governance* diharapkan mampu mengurangi tindak kecurangan pada pelaporan keuangan yang disusun oleh manajemen yang menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan audit atau *audit report lag* (Kuslihaniati, 2016).

Salah satu komponen *good corporate governance* yang bertugas mengawasi partisipasi manajemen dalam proses pelaporan keuangan adalah komite audit. Komite audit adalah sebuah suatu komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Independen untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas dari Dewan Komisaris

POJK No. 55/POJK.04/2015. Penelitian Wardani dan Raharja (2013) mendapatkan dukungan dari Faishal dan Hadipradjitno (2015) yang menyatakan bahwa ukuran jumlah komite audit kemungkinan tidak memperpendek masa audit report lag perusahaan. Sementara penelitian oleh Haryani dan Wiratma (2014) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat proporsi komite audit akan memperpendek masa *audit report lag* pada perusahaan dimana penambahan jumlah anggota komite audit akan meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelesaian laporan keuangan.

Komite audit merupakan komite yang berperan serta memiliki fungsi utama yaitu memperbaiki kualitas laporan keuangan, meningkatkan keyakinan publik dan mengurangi peluang terjadinya tindak kecurangan dalam perusahaan oleh karena itu komite audit harus memiliki sifat independen (Ariani dan Ardiati, 2014). Syarat-syarat keanggotaan komite audit dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 salah satunya adalah komite audit harus bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian oleh Ayushabrina dan Rahardjo (2014) dan Kuslihaniati (2016) menyatakan independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sementara penelitian oleh Gunarsa dan Putri (2017) menyatakan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Hasil laporan komite audit atas laporan keuangan auditan dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan gambaran mengenai efektivitas

kinerja manajemen selama satu periode dengan meninjau laba (profit) yang diperoleh perusahaan (Suginam, 2016). Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama rentang waktu atau periode tertentu (Suparsada dan Putri, 2017). Hasil penelitian oleh Ariani dan Budiarta (2014), terdapat perbedaan perlakuan laporan keuangan ketika perusahaan memperoleh laba tinggi dan rendah dimana perusahaan ketika mengalami profitabilitas tinggi akan melaporkan hasil audit laporan keuangan lebih cepat dibandingkan saat perusahaan mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan penelitian Pramaharjan dan Cahyonowati (2015). Sementara itu Diana (2016) menyimpulkan perusahaan baik yang sedang mengalami keuntungan (profit) maupun kerugian akan tetap melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan.

Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor dan klien dengan kerjasama yang relatif lama akan memberikan suatu keuntungan dan manfaat bagi keduanya. Menurut Octaviani (2017) lama masa perikatan antara auditor dan klien atau tenure akan membantu auditor dalam memperoleh ketepatan, kecermatan dan keahlian dalam proses mengaudit laporan keuangan milik klien sehingga akan memperpendek masa *audit report lag*. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian oleh Kusumah dan Manurung (2016). Sementara itu penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Diastiningsih dan Tenaya (2017)

dimana semakin lama perikatan maka auditor akan menciptakan kedekatan yang lebih intens sehingga memberikan peluang pada auditor untuk mengulur hasil laporan keuangan auditan.

Dalam melaporkan laporan keuangan, setiap perusahaan akan menginginkan laporan keuangannya di audit oleh auditor yang andal agar dilaporkan tepat waktu dengan kualitas yang baik (Ariani dan Budiarta, 2014). Reputasi Kantor Akuntan Publik dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan skala *The Big Four* dan *The Non-Big Four*. Beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa KAP *Big Four* lebih kredibel karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan lebih profesional dibandingkan dengan KAP *Non-Big Four*, sehingga akan memperpendek *audit report lag* yaitu oleh Parwati dan Suhardjo (2009) dan Pramaharjan dan Cahyonowati (2015). Sementara penelitian Tiono dan JogiC (2013) dan Widhiasari dan Budiarta (2016) menyatakan tidak ada pengaruh antara reputasi KAP dengan *audit report lag* dengan alasan KAP dengan skala *The Big* tidak menjamin memperpendek masa *audit report lag*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian oleh Gunarsa dan Putri (2017) dengan variabel yang diukur yakni besaran komite audit, independensi dari komite audit dan profitabilitas terhadap audit report lag yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Meski demikian penelitian yang akan dilakukan ini memiliki beberapa perbedaan yaitu pertama, dilakukan penambahan variabel

independen berupa tenure audit dan reputasi KAP. Pemilihan variabel tenure audit dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh lama perikatan auditor dengan perusahaan terhadap *audit report lag*. Sedangkan penambahan variabel reputasi KAP digunakan untuk memberikan kepastian ada tidaknya hubungan ukuran KAP terhadap *audit report lag*. Selain itu, alasan lain mengapa penulis menambahkan dua variabel tersebut yaitu masih ada perbedaan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan dua variabel tambahan tersebut. Kedua, terdapat perbedaan dimensi waktu dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2013-2015. Sementara pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang dan kasus yang terjadi diatas, judul yang diambil adalah **“PENGARUH UKURAN KOMITE AUDIT, INDEPENDENSI KOMITE AUDIT, PROFITABILITAS, TENURE AUDIT, DAN REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AUDIT REPORT LAG (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2012-2016)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Hal yang dikaji dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit, profitabilitas, tenure audit dan reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap *audit report lag*.

2. Laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016.
3. Laporan keuangan perusahaan manufaktur dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dalam penelitian
4. Simulasi digunakan untuk mengetahui permasalahan terkait isu yang diangkat. Setelah diketahui permasalahan akan dilakukan analisis penyebab isu yang ditimbulkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, peneliti mengidentifikasi masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
2. Apakah Independensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
3. Apakah rasio Profitabilitas pada perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?
4. Apakah Tenure Audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

5. Apakah Reputasi Kantor Akuntan Publik berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
2. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh independensi komite audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
3. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
4. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh tenure audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.
5. Untuk menguji secara empiris dan mengetahui pengaruh reputasi kantor akuntan publik terhadap *audit report lag* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat berguna:

1. Bagi Perusahaan.

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dan referensi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lamanya waktu pelaporan audit bagi perusahaan, karena *audit report lag* yang pendek akan semakin menambah citra baik perusahaan yang akan menambah daya tarik minat investor terhadap saham perusahaan terkait.

2. Bagi Pihak Lain (akademis).

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran serta informasi untuk berbagai pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *audit report lag* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Bagi Investor.

Sebagai Bahan Pertimbangan untuk melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia khususnya pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.